

**KOORDINASI UNSUR ANGGOTA TRIPIKA  
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**



**ASBULLAH**

**105610419711**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**KOORDINASI UNSUR ANGGOTA TRIPIKA  
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

**Disusun Dan Diusulkan Oleh**

**ASBULLAH**

**105610419711**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Koordinasi unsur anggota TRIPIKA di kecamatan somba opu kabupaten gowa

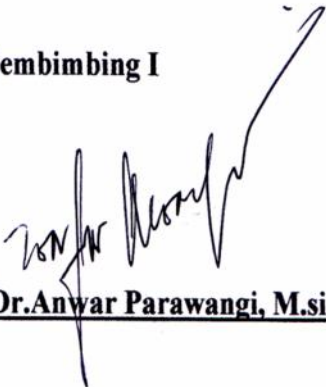
Nama Mahasiswa : Asbullah

Nomor Stambuk : 10561 0419711

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

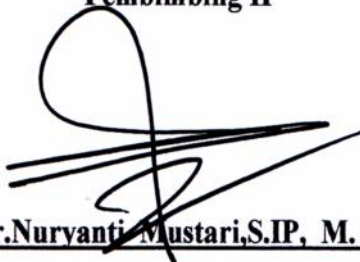
### Menyetujui

**Pembimbing I**



Dr. Anwar Parawangi, M.si

**Pembimbing II**



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. Si

### Mengetahui

**Dekan**


**Fisipol Unismuh Makasaar**



Dr. Haniyati Malik, S.Sos, M. Si

**Ketua Jurusan**

**Ilmu Administrasi Ngara**



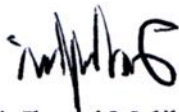
Nasrul Haq, S. Sos., M. PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Administrasi negara di Makassar pada hari Senin 20 Agustus 2018

### TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

### PENGUJI

1. Dr. Hj. FatmaWati, M. Si
2. Dr. Anwar Parawangi, M. Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M. Si
4. Drs. Ruskin Azikin, MM



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Asbullah

Nomor Stambuk : 105610419711

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, - Agustus - 2018

Yang Menyatakan



Asbullah

## **KOORDINASI UNSUR ANGGOTA TRIPIKA DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**ASBULLAH, ANWAR PARAWANGI<sup>2</sup>,NURIYANTI MUSTARI<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana koordinasi unsur anggota tripika di kecamatan somba opu kabupaten gowa. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa observasi, dokumen. atau melalui wawancara 7 anggota tripika di kecamatan somba opu kabupaten gowa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat yang terkait dalam hal ini yaitu: komunikasi, pembagian tugas, kesatuan tindakan, dan kedisiplinan. Sementara faktor kesatuan tindakan dan kedisiplinan masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya rasa kesadaran anggota dalam bekerja.

**Kata kunci:** koordinasi, TRIPIKA

## KATA PENGANTAR



***“AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatu”***

Puja dan Puji hanya milik Allah SWT dan tak lupa pula salawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana S.Sos pada jurusan studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Dr.Anwar Parawangi, M.Si Sebagai pembimbing pertama dan Dr. Nuriyanti Mustari,S.Ip.,M.Si sebagai pembimbing kedua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulisi.
2. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M. PA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Camat somba opu kabupaten gowa, yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Penulis Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Muh. Natsir Rewa) dan Ibunda (Maimunah S.Pd) atas doa, bimbingan, pengertian serta segala dukungan moril maupun materil yang tidak pernah ada putusnya. Mungkin sekarang penulis tidak bisa memberikan apa-apa tapi suatu hari penulis akan membuat kalian bangga.
8. Ucapan terima kasih spesial buat istri yang tercinta, Vesty Winangsih karena sudah bersama-sama membangun bahtera rumah tangga, dan sering memberikan motivasi dan memberikan dukungan materil dan non material.
9. Saudara Penulis broku Syamsu Marlin, Saudarah sisterku Nur Afni dan yang si bungsuku, Afriliah. Terima kasih atas kasih sayang kalian, doa, dan dukungan kalian kepada penulis selama ini. dan untuk pemberi support paling banyak pemberi nasehat paling banyak selama 6 tahun terakhir ini.
10. Ucapan terima kasih kepada, Zuhdi ilahi wakano S.Sos. dan Nurul Amroni S.Sos. yang sering membantu saya dalam penyusunan skripsi, dan memberikan motivasi, dukungan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.



11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 di Jurusan Ilmu Administrasi negara, terkhusus kelas E yang telah bersama-sama berusaha keras dan penuh semangat dalam menjalani studi baik suka maupun duka. Kebersamaan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak akan dilupakan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, - Agustus - 2018

Penulis



Asbullah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masaah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Koordinasi.....	10
B. Konsep Kecamatan.....	20
C. Konsep Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor).....	24
D. Konsep Danramil .....	27
E. Kerangka pikir .....	29
F. Fokus Penelitian .....	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B. Koordinasi TRIPIKA Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	49
C. Kendala Dalam Koordinasi TRIPIKA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	62

**BAB V PENUTUP**  
A. Kesimpulan..... 65  
B. Saran..... 66

**DAFTAR PUSTAKA..... 67**  
**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Merriam Budiardjo, (2012:8) negara merupakan suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintahkan oleh sejumlah pejabat dan menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,

peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada undang-undang tersebut pada huruf b dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Kecamatan, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa perangkat daerah yakni Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) yakni kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) yakni mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Di era globalisasi ini, penyelenggaraan segala kegiatan maupun usaha dalam menjaga kestabilan daerah teritorial di tingkat kecamatan yakni desa-desa di daerah harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, contohnya pada pemerintah di kecamatan Somba Opu. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mampu berkoordinasi dengan instansi-instansi baik secara vertikal maupun kepada masyarakat setempat serta jajaran pimpinan kecamatan itu sendiri. Jajaran pimpinan yang ada di Kecamatan itu sendiri terdiri dari

Kapolsek yang bertugas penuh pada keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat setempat serta Danramil yang bertanggung jawab pada daerah teritorialnya.

Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (I) tentang Pemerintah Daerah dibahas tentang Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang berbunyi “untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum maka dibentuklah forkopimda provinsi, forkopimda kabupaten/kota, Forum koordinasi pimpinan di kecamatan”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) yang berbunyi “Anggota Forkopimda (Forum Koordinasi pimpinan Daerah) di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan” maka dibentuklah sebuah organisasi permusyawaratan dimana organisasi ini akan memutuskan suatu pilihan dengan melihat suara terbanyak dari masyarakat serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang saat ini dikenal dengan nama TRIPIKA (tiga pimpinan kecamatan), dimana pimpinan kecamatan ini terdiri dari Camat sebagai pemerintah setempat, Kapolsek yang bertanggung jawab pada bagian keamanan serta Danramil untuk menjaga keutuhan daerah teritorialnya.

Anggota tripika ini memiliki andil yang cukup besar untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut, ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk

menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

TRIPKA ini dibentuk dengan alasan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban dalam menjalani aktifitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Karenanya masyarakat harus memiliki rasa yakin akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan, dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan masyarakat yang dilakukan oleh kalangan maupun dari pihak-pihak tertentu.

Berbagai kejadian (*in-stabilisasi*) tersebut yang menjadi pemicu terjadinya tindakan dekonstruktif adalah masalah etnis dan politik yang mengorbankan sebagian besar masyarakat yang tidak bersalah/tidak tahu menahu dengan pokok permasalahan. Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Wilayah hukum Polsek adalah di daerah kecamatan dan atau gabungan beberapa kecamatan.

Adapun peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Polri sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-



undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Dalam perkembangannya tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Negara dalam hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya hal yang seringkali terjadi antar masyarakat, seperti perbedaan pendapat, kejahatan yang kecil namun meresahkan, dan pengambilan keputusan yang terkadang berujung perkelahian pada wilayah kecamatan maka dibutuhkan sebuah organisasi yang mampu menyatukan suara dan pendapat masyarakat. Tidak terkecuali adanya organisasi Muspika dalam lingkup kecamatan dimana peran sebagai unsur Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan) sebagai forum koordinasi antar pimpinan kecamatan sangat strategis dalam mengimplementasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah sehingga sebagai sesama unsur tripika harus selalu menjaga kekompakan, komunikasi yang lancar yang akan memaksimalkan segala kegiatan, harus menjaga kedisiplinan dalam bekerjasama dilapangan serta komitmen dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada instansi masing-masing sehingga nantinya roda pemerintahan akan berjalan lancar. Unsur tripika melakukan koordinasi dengan unsur-unsur anggota di dalamnya. Camat bertugas di bidang pemerintahan, Kapolsek bertugas di bidang keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta Danramil berwenang di bidang wilayah teritorial seperti melakukan pembinaan kemampuan dan mental membuat rencana kegiatan pembinaan, melakukan pendataan geografi, demografi dan kondisi social lalu melapor setiap perkembangan situasi kepada Dandim. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotifasi untuk melakukan

penelitian dengan judul “Koordinasi unsur anggota TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi koordinasi anggota TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengutip dua tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koodinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi koordinasi anggota TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut :

1. Sebagai saran/masukan bagi Pemerintah di Kecamatan Somba Opu agar lebih mengoptimalkan koordinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Bagi perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Koordinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Koordinasi**

Secara etimologi kata koordinasi berasal dari perkataan “*cum*” yang berarti berbeda-beda dan “*ordinare*” yang berarti penyesuaian atau penempata pada keseharusannya. Kata *coordination* berasal dari kata *ordinare* yang berarti to regulate. Dilihat dari pendekatan empiric dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Dilihat dari sudut normative koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada penyampaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Taliziduhu Ndraha (2011:290)

Koordinasi dalam hal ini harus memperhatikan koordinasi antar manusianya terlebih dahulu. Ada 5 elemen dasar manajemen sumber daya manusia yang mesti dicapai untuk mencapai tujuan yaitu kegiatan sumber daya untuk mencapai tujuan, proses dilakuakn secara rasional, melalui manusia lain, menggunakan metode dan tehn tertentu menurut Abdurrahmat

Fathoni dalam bukunya Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia (2006). Semuanya itu harus dilakukan sebelum melangkah pada koordinasi antar organisasi.

Menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (2006:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut Handoko (2003: 195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Koordinasi sangatlah penting dalam suatu organisasi. Koordinasi sendiri didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian Koordinasi yang efektif dalam organisasi diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikuti yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk melihat kemampuan seseorang dalam memimpin dan melakukan koordinasi dapat dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya yang dikenal dengan rentang manajemen.

Koordinasi diharapkan mampu menciptakan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan

selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian aktivitas pada satuan-satuan terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efisien. Atau proses menghubungkan aktivitas-aktivitas dari berbagai departemen dalam suatu organisasi. Aktivitas kerja pada organisasi dibagi-bagi dan didepartemenkan, maka para manajer perlu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer harus mengkoordinasikan tujuan ke submit. Menerjemahkan tujuan ke dalam tujuan submit yang sesuai. Disamping itu juga menyampaikan informasi kepada submit tentang aktivitas subunit lain sehingga bagian-bagian organisasi yang terpisah dapat bekerja sama dengan lancar (<http://syarifhidayat21.blogspot.co.id/2010/11/koordinasi>).

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan

pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hubungan kerja sebagai suatu kesatuan organisasi, pemerintah mengenal adanya berbagai hubungan kerja kedinasan (formal) antara unit yang satu dengan unit yang lain. Hubungan-hubungan kerja dapat digolongkan menjadi 2 jenis hubungan pokok (<http://annisazuhrotuljannah.wordpress.com>):

a. Hubungan kerja hirarki

Bersifat vertical adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis hubungan vertical ini terdapat hubungan pemerintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan atas wewenang masing-masing.

b. Hubungan kerja fungsional

Bersifat horizontal dan merupakan hubungan kerjasama antara 2 atau lebih unit organisasi/pejabat yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Dalam kenyataannya hubungan ini dapat pula bersifat diagonal. Misalnya hubungan secara fungsional antara satu unit dengan unit yang lain tidak setingkat dalam hubungan fungsional yang sama.

Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan



organisasi". Dalam hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang dilakukan anggota tidak bekerja secara sendiri-sendiri sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana dalam koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan beberapa factor menurut Hasibuan (2006:88) yakni :

- a. Kesatuan tindakan, pada hakekatnya memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota agar anggota tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
- b. Komunikasi, tidak dapat dipisahkan dengan koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.
- c. Pembagian kerja, prinsip dari pembagian kerja ini maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya , maka hendaknya lakukan pembagian kerja.
- d. Disiplin, pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Menurut E.F.L Brech dalam bukunya, *the principle and practice of managent* yang dikutip Handayaniingrat (2002:54) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Koordinasi dalam hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang ingin dilakukan berjalan efisien karena dilakukan oleh orang-orang yang cocok sesuai dengan pemahaman koordinator.

Handayaniingrat menekankan betapa pentingnya peranan koordinasi dalam pembangunan. Apabila fungsi koordinasi itu dikaitkan dengan fungsi pimpinan maka ia akan mencakup wawasan yang lebih luas lagi, koordinasi dalam kepemimpinan administrasi akan mencakup aktifitas seorang pimpinan dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam organisasi. Akan menyangkut kemampuan dalam mengambil keputusan dan perumusan dalam pemecahan masalah yang manusiawi dengan meningkatkan keterpaduan dengan unit kerja lainnya. Adapun pengertian koordinasi menurut beliau ialah: “Koordinasi ialah konsep dasar kedua disamping kepemimpinan (*leadership*). Sebab koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif adalah menjalin koordinasi yang baik, sebab pemimpin berperan sebagai koordinator”. Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya :

- a. Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal ini merupakan inti koordinasi.
- b. Mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Merupakan alat pendekatan personal dalam

hubungannya dengan pendekatan yang bersifat lintas sektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan.

Pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai, Apabila dianalisa lebih lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu

- a. Tanggung jawab koordinasi berada pada Pimpinan.

Oleh karena itu koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan. Dikatakan pimpinan yang berhasil apabila melakukan koordinasi dengan baik.

- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama

Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi sebaik-baiknya.

- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus

Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur

Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

e. Konsep Kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni:

1. *Sense of cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama , dilihat perbagian
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
3. *Team spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai
4. *Esprit de corps*, bagian yang saling menghargai akan semakin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau bagian yang satu

dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, (<http://syarifhidayat21.blogspot.co.id/2010/11/koordinasi>).

Didalam melakukan koordinasi tiap unsur tripika, ada beberapa bentuk yang meliputi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan keamanan masyarakat, yaitu tindakan untuk keamanan masyarakat bisa terjaga.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dimaksud adalah masyarakat memiliki untuk memulai proses kegiatan social agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi taraf hidup masing-masing individu maupun masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dalam memelihara sarana dan prasarana dimana segala fasilitas yang ada pada suatu wilayah dapat terpelihara dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Ada pun yang menjadi dasar hukum diatas adalah UU no.23 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang pemerintah daerah.

Pentingnya peranan koordinasi bagi seorang pimpinan terutama dalam hal menciptakana asas keselarasan dan keseimbangan dalam mewujudkan tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Betapa pentingnya fungsi koordinasi dalam rangka keterpaduan keamanan suatu wilayah termasuk

daerah pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut (<http://kompasiana.com.amp/nur-maya/fungsi>) :

- a. Koordinasi yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Koordinasi yang efektif memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya tugas-tugas yang bersifat khusus dan spesifik.
- c. Melalui koordinasi yang baik akan merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan terutama menyangkut hal-hal yang bersifat multi dimensional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga nantinya tujuan yang telah direncanakan akan tercapai sesuai target.

Sehingga dalam hal koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan beberapa faktor menurut Hasibuan (2006:88) yakni :

- a. Kesatuan tindakan, pada hakekatnya memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota agar anggota tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

- b. Komunikasi, tidak dapat dipisahkan dengan koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.
- c. Pembagian kerja, prinsip dari pembagian kerja ini maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja.
- d. Disiplin, pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan, (<http://kompasiana.com.amp/nur-maya/fungsi>)

## **B. Konsep Kecamatan**

Ensiklopedia Nasional Indonesia, kecamatan adalah sebuah wilayah administrasi dibawah kabupaten. Kecamatan terdiri dari desa-desa. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota. Dalam peraturan pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan mengatakan : kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerjasama sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 huruf m adalah sebagai berikut: "Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota". Sebagaimana definisi ini maka Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-Undang ini kedudukannya diubah

menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Daerah kota. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pendefinisian secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada penjelasan pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota”.

Undang-Undang ini tidak mendefinisikan istilah kecamatan pada batang tubuhnya melainkan pada penjelasan pasalnya. Pendefinisian langsung istilah kecamatan pada batang tubuh terdapat pada peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang menyatakan bahwa: “Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa kecamatan hanyalah sebatas status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 sampai dengan 8, yang menyatakan: "Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota. "Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota. "Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan



pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Perubahan pentingnya yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan Camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian Camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Defenisi camat menurut Bayu Suryaningrat (1981: 1) adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga sebagai eksekutif seorang pelaksana tugas pemerintah. Dari pengertian diatas Camat sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengkoordinasikan, memimpin pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan disamping merencanakan dan melaksanakan program pemerintah, Camat juga dapat membina ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan

dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Konsep KAPOLSEK (Kepala Kepolisian Sektor)**

Kapolsek merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas memimpin, mengatur, serta mengendalikan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, termasuk pengamanan markas serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut (<http://gurupkn.com/anggota-muspika>):

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
3. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Adapun tugas-tugas dari Kapolsek antara lain adalah :

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepala Kapolres terkait hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan polsek sehingga tepat pada sasaran
3. Menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi Polsek sebagaimana mestinya
4. Melakukan pembinaan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan kerjanya;
5. Melakukan upaya-upaya guna memelihara serta meningkatkan kemampuan operasional polsek;
6. Berkoordinasi serta melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan serta pengarahan terkait teknis pelaksanaan fungsi dari kepolisian, penertiban dan penyelamatan masyarakat yang berada dalam wilayahnya sesuai kedudukan, tanggung jawab, dan wewenangnya;
7. Bertanggung jawab langsung kepada Kapolres terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi kapolsek adalah :

1. Pemberi saran pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
2. Pengawasan, pengendalian, pemimpin, serta Pembina organisasi lingkungan polsek;
3. Unsure pelaksana kewilayaan dalam jajaannya termasuk kegiatan pengamanan markas.

#### **D. Konsep DANRAMIL (Komandan Rayon Militer)**

Danramil merupakan seorang yang menjabat sebagai Komandan yang menjadi pimpinan dari sebuah Komando Rayon Militer (Koramil) yang merupakan satuan teritorial bagian dari TNI Angkatan Darat yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil di tingkat kecamatan. Danramil dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat yang berpangkat Mayor atau Kapten dan ia memiliki tanggung jawab langsung terhadap Dandim.

Berdasarkan erkasad/19/IV/2008 menyatakan bahwa Danramil memiliki tugas-tugas antara lain :

1. Memimpin serta melakukan pengendalian terhadap semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Koramil sesuai dengan tugasnya;
2. Membuat rencana kegiatan terkait pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas serta tanggung jawabnya
4. Melakukan pembinaan mental dan kemampuan, serta meningkatkan kesejahteraan moril, hukum, tata tertib, dan disiplin satuannya.
5. Melakukan pembinaan teritorial serta perlawanan rakyat sesuai dengan rencana kerja Dandim

6. Melakukan pendataan geografi, kondisi sosial, dan demografi, serta memelihara aspek-aspek tersebut guna kepentingan perlawanan wilayah
7. Membuat laporan terkait perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang kerjanya

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil).

Sehingga dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata (Sistem Pertahanan

dan Keamanan Rakyat Semesta) itu. Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Sistem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara.

#### **E. Kerangka Pikir**

Fungsi pemerintah adalah menjadi wewenang masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam segala aspek terutama dalam masalah keamanan masyarakat di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini, koordinasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal keamanan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi indikator koordinasi yang baik, sehingga ada beberapa point yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan koordinasi menurut Hasibuan sebagai berikut :

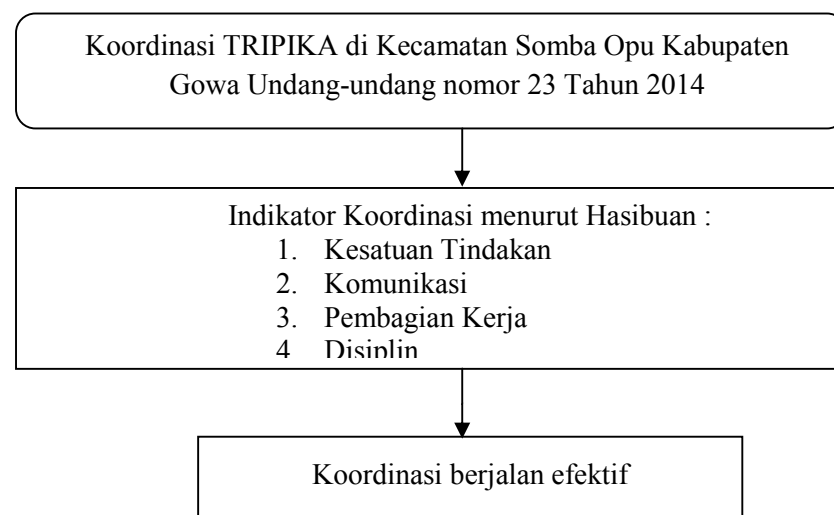
- 1) Adanya kesatuan tindakan, dimana hal ini dibutuhkan agar anggota atau organisasi terkait tidak bekerja sendiri-sendiri termasuk mengenai target dan jadwalnya,
- 2) Adanya komunikasi, maksudnya agar segala informasi yang ada dapat termpul untuk dibagikan ke masing-masing instansi yang ikut andil dalam kegiatan koordinasi tersebut,



- 3) Adanya pembagian kerja yaitu untuk membagi tugas yang dilaksanakan sehingga pekerjaan yang ada dapat terlaksana sesuai target.
- 4) Adanya sikap disiplin dalam bekerja sehingga pekerjaan lebih mudah terkontrol.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan itu peneliti menggambarannya dalam bentuk bagan di seperti di bawah ini

#### **Bagan kerangka pikir**



#### **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini penulis menfokuskan pada koordinasi TRIPIKA yang terdiri dari anggota Kecamatan, Kapolsek, dan Danramil di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

- a. Tripika atau tiga pimpinan kecamatan adalah suatu organisasi yang terdiri dari pimpinan-pimpinan kecamatan seperti Camat, DANRAMIL, dan KAPOLSEK yang berperan penting dalam memaksimalkan segala kegiatan di lingkup kecamatan

- b. Koordinasi TRIPIKA merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh pimpinan yang berada di kecamatan.
- c. Kesatuan tindakan dalam hal ini dimaksud agar anggota TRIPIKA dalam suatu organisasi dapat bekerja sesuai dengan perintah sehingga anggota tidak berjalan sendiri-sendiri.
- d. Komunikasi di sini juga tidak dapat dipisahkan dengan koordinasi karena komunikasi yang baik dapat membangun koordinasi yang baik pula, tanpa komunikasi yang baik maka koordinasi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan.
- e. Pembagian kerja ini dimaksudkan jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya maka hendaknya lakukan pembagian kerja agar pekerjaan berjalan efisien.
- f. Disiplin dalam hal ini pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan jadi sangat dibutuhkan sikap disiplin dalam bekerja.
- g. Efektifitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilakukan. Lokasinya yakni di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Lokasi-lokasi penelitian tersebut yakni Kantor Kecamatan, Kapolsek, dan Danramil yang berada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Hal ini dimaksud karena instansi tersebut merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam koordinasi unsur TRIPIKA tingkat kecamatan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif deduktif dengan tipe deskriptif dan fenomenologi. Jenis penelitian ini mengkaji obyek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konstektual melalui pengumpulan data yang di peroleh. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupakata-kata. Dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Metode ini

digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang koordinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisis fenomena-fenomena mengenai koordinasi TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan optimalisasi koordinasi pemerintah.

### **D. Informan Penelitian**

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang dijabarkan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan/ Instansi	Inisial	Jumlah
1.	Zubair Usman, S.STP,M.Si	Camat Somba Opu	ZU	1 orang
2.	Zaldi. RM. SE	Pegawai Kecamatan	Z	1 orang
3.	Sirajuddin	Danramil	SR	1 orang
4.	Dwi Gusti	Kepolisian	DW	1 orang
5.	H. Lebu	Kepolisian	L	1 orang
6.	Hamzah	Masyarakat	H	1 orang
7.	Fatimah	Masyarakat	F	1 orang
Total Informan				7 Orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, cara pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dengan lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Observasi ini tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.
- b. *Interview* (wawancara) yakni salah satu teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab langsung mengenai

optimalisasi koordinasi TRIPIKA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

- c. Dokumentasi yakni digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun sasaran dokumentasi yaitu foto-foto dari Kantor Kecamatan Somba Opu serta Tokoh Masyarakat yang ikut andil dalam koordinasi TRIPIKA.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data (Miles dan Huberman dalam buku *Metode Evaluasi Kualitatif* (Patton. 2006).

- a. Reduksi data, data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai sekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang

hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

- b. Penyajian data, data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan *display* data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbebani dengan setumpuk data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dari peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitasi, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

#### **G. Pengabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda dalam buku (Bungin B. 2001)“ Metode Penelitian Kualitatif“ yaitu :

1) Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informasi sebelumnya.

2) Triangulasi Metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai koordinasi unsur anggota TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, penulis akan memaparkan profil lokasi penelitian, yakni :

##### **1. Keadaan penduduk Kecamatan Somba Opu**

Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang. Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah perkotaan, 137.942 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 68.398 jiwa dan perempuan sebesar 69.544 jiwa. Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 persen. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 Kepala Keluarga.

**Tabel. 1.1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Somba Opu Tahun 2016**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk
1	Pandang-pandang	7.654
2	Sungguminasa	7.674
3.	Tompobalang	10.992
4.	Batangkaluku	13.845
5.	Tamarunang	13.785
6.	Bontoramba	3.660
7.	Mawang	4.302
8	Romang polong	6.930
9.	Bonto-bontoa	12.810
10.	Kalegowa	2.534
11.	Katangka	9.971
12.	Tombolo	15.313
13.	Paccinongang	21.069
14.	Samata	7.405

\*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2016

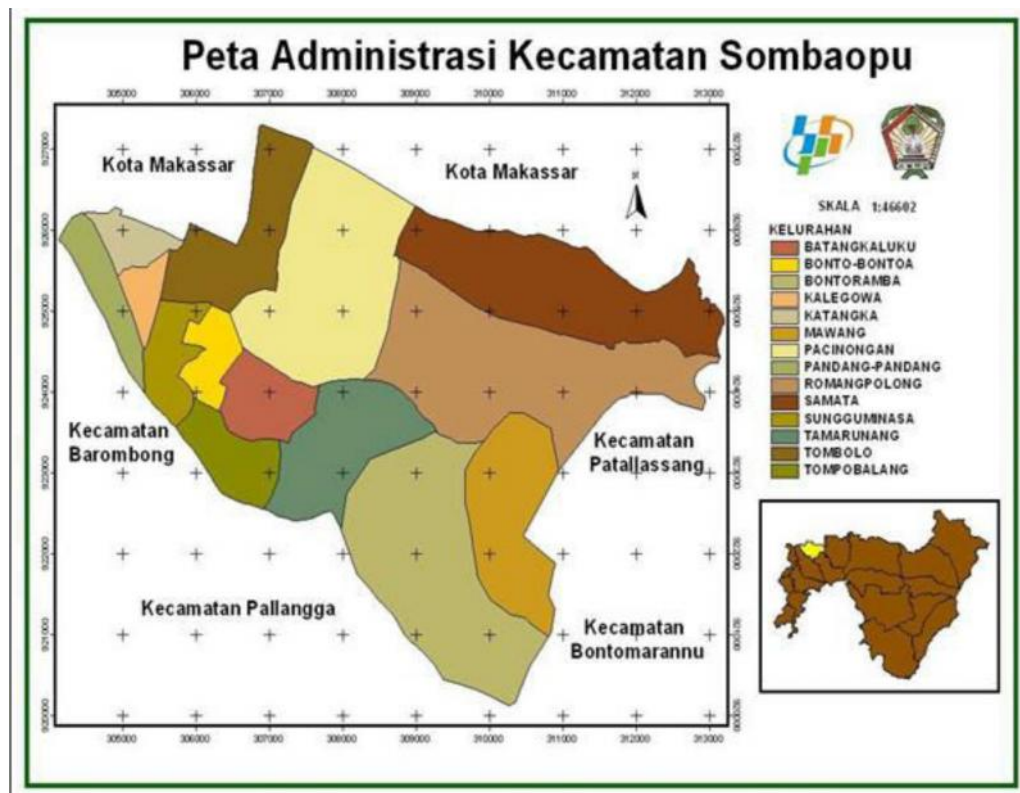
Adapun luas wilayah 28,09 Km<sup>2</sup> atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah Kabupaten Gowa), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Kota Makassar
- Sebelah Barat : Kota Makassar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga (sungai) Jeneberang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu

Adapun beberapa Lingkungan di Kecamatan Somba Opu, yakni :

- Lambaselo - Jeneberang -Hasanuddin - Pao-pao
- Sunguminasa - Lakiyung -Tamalat - P.gentungang
- Bonto-bontoa - Katangka - Samata -Boroanging
- Bontokamase - Pandang2-Borongraukan - Galonggoro

- B.kaluku - Mangasa-Romang polong - Bontobaddo
- Karetappa - Tombolo-Garaganti - Biring baling
- Cmbaya - Pa'bangngian - Paccinongan - buttadidi
- 134 RW
- 421 RW



## 2. Tingkat Pendidikan Kecamatan Somba Opu

Pendidikan adalah suatu ilmu yang kita pelajari. Dengan adanya pendidikan kita dapat mempelajari dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang penting. Pendidikan sangat penting kita dapatkan, karena jika kita tidak mengetahui dan mendapatkan ilmu kita akan mudah di tipu dan di dimainkan oleh orang. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu

berkembang dalam pendidikan. secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.

Pendidikan memang adalah hal yang terpenting, maka dari itu di Kecamatan Somba Opu menerapkan pendidikan gratis mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas, program ini merupakan Program dari pemerintah yang sudah di terapkan sejak sepuluh tahun terakhir, berikut beberapa daftar sekolah yang ada di Kecamatan Somba Opu

- a. Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun 2004-2006 sebanyak 58 sekolah dan pada tahun 2007-2009 sebanyak 41 sekolah, jumlah guru sebanyak 163 orang (perempuan), dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 1.124 orang dan murid perempuan sebanyak 1.203 orang.
- b. Jumlah Sekolah Dasar sebanyak 44 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 14 buah, sekolah Inpres 29 buah, dan sekolah swasta 1 buah. Jumlah guru SD sebanyak 241 orang (laki-laki) dan 335 orang (perempuan) dengan perincian berdasarkan status yaitu guru sekolah negeri sebanyak 103 orang (laki-laki) dan 123 orang (perempuan), guru sekolah Inpres sebanyak 135 orang (laki-laki) dan 207 (perempuan), sedangkan guru sekolah swasta sebanyak 3 orang (laki-laki) dan 5 orang (perempuan).
- c. Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) yang laki-laki sebanyak 6.835 orang dan murid perempuan sebanyak 7.935 orang dengan perincian berdasarkan

status yaitu murid sekolah negeri sebanyak 2.630 orang (laki-laki) dan 3.320 orang (perempuan), murid sekolah Inpres sebanyak 4.126 orang (laki-laki) dan 4.520 orang (perempuan), sedangkan murid sekolah swasta sebanyak 79 orang (laki-laki) dan 95 orang (perempuan).

- d. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 1 sekolah, jumlah guru sebanyak 8 orang (laki-laki) dan 10 orang (perempuan), dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 51 orang dan murid perempuan sebanyak 52 orang.
- e. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2 sekolah, jumlah guru sebanyak 8 orang (laki-laki) dan 4 orang (perempuan), dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 92 orang dan murid perempuan sebanyak 82 orang.
- f. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 17 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 6 buah, dan sekolah swasta 11 buah.
- g. Jumlah guru SLTP sebanyak 145 orang (laki-laki) dan 215 orang (perempuan) dengan perincian berdasarkan status yaitu guru sekolah negeri sebanyak 82 orang (laki-laki) dan 144 orang (perempuan), guru sekolah swasta sebanyak 63 orang (laki-laki) dan 71 (perempuan).
- h. Jumlah murid SLTP yang laki-laki sebanyak 2.321 orang dan murid perempuan sebanyak 2.567 orang dengan perincian berdasarkan status yaitu murid sekolah negeri sebanyak 1.832 orang (laki-laki) dan 2.814 orang (perempuan), murid sekolah swasta sebanyak 484 orang (laki-laki) dan 548 orang (perempuan).

- i. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5 sekolah, jumlah guru sebanyak 36 orang (laki-laki) dan 60 orang (perempuan), dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 437 orang dan murid perempuan sebanyak 400 orang.
- j. Jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 10 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 2 buah, dan sekolah swasta 8 buah.
- k. Jumlah guru SMU sebanyak 120 orang (laki-laki) dan 130 orang (perempuan) dengan perincian berdasarkan status yaitu guru sekolah negeri sebanyak 35 orang (laki-laki) dan 32 orang (perempuan), guru sekolah swasta sebanyak 85 orang (laki-laki) dan 98 (perempuan).
- l. Jumlah murid SMU yang laki-laki sebanyak 1.213 orang dan murid perempuan sebanyak 1.547 orang dengan perincian berdasarkan status yaitu murid sekolah negeri sebanyak 622 orang (laki-laki) dan 892 orang (perempuan), murid sekolah swasta sebanyak 591 orang (laki-laki) dan 655 orang (perempuan).
- m. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5 sekolah, jumlah guru sebanyak 45 orang (laki-laki) dan 55 orang (perempuan), dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 286 orang dan murid perempuan sebanyak 389 orang.
- n. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 8 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 2 buah, dan sekolah swasta 6 buah.

- o. Jumlah guru SMK sebanyak 125 orang (laki-laki) dan 155 orang (perempuan) dengan perincian berdasarkan status yaitu guru sekolah negeri sebanyak 20 orang (laki-laki) dan 63 orang (perempuan), guru sekolah swasta sebanyak 105 orang (laki-laki) dan 92 (perempuan).
- p. Jumlah murid SMK yang laki-laki sebanyak 900 orang dan murid perempuan sebanyak 1.030 orang dengan perincian berdasarkan status yaitu murid sekolah negeri sebanyak 433 orang (laki-laki) dan 342 orang (perempuan), murid sekolah swasta sebanyak 467 orang (laki-laki) dan 688 orang (perempuan).

### **3. Penyelenggara Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 53 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Kabupaten Gowa.

Adapun tugas dan Fungsi Camat pada Kantor Kecamatan adalah :

#### **1) CAMAT**

Adapun tugas pokok Camat memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Kelurahan perekonomian, Kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Camat sebagai berikut :

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) serta keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.



- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

## 2) DANRAMIL/KORAMIL

Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan teritorial dan berada tingkat Kecamatan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali Komando Distrik Militer. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) dengan pangkat Mayor/Kapten dan seorang Bintara tinggi untuk jabatan Danposramil dengan pangkat (Peltu/Pelda).

Tugas pokok danramil adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.
1. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, moral, hukum, disiplin dan tata tertib satuan.
4. Melaksanakan Pembinaan Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja Dandim.
5. Melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta meme-liharanya untuk kepentingan perlawanan wilayah.
6. Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim.

7. Danramil dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Dandim.

### **3) KEPOLISIAN**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

Adapun tugas dari kapolsek yakni :

1. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
3. penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;

4. penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
9. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
10. pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

#### **B. Koordinasi TRIPIKA Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para

bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Koordinasi juga merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga nantinya tujuan yang telah direncanakan akan tercapai sesuai target. Adapun indikator dalam hal koordinasi TRIPIKAdi kecamatan Somba Opu ini menurut Hasibuan dilakukan agar koordinasi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam koordinasi pemerintah maka dilakukan penelitian dan wawancara sebagai berikut.

a) Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-

usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik semisal dengan mengatur jadwal yang mana dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kesatuan tindakan ini akan menciptakan keselarasan dari pihak Kecamatan, Danrnil/Koramil, dan Kapolsek dalam koordinainya sebagai anggota *TRIPIKA*. Dengan bekerja bersama maka tujuan yang ingin dicapai oleh ketiga instansi terkait dapat terwujud dengan baik. Kasus yang di tangani oleh anggota Tripika, Seperti Banjir dan kebakaran di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

- a. Banjir yang melanda di wilayah perumahan mutiara permai I. Ketinggian genangan air di daerah ini, hingga paha orang dewasa. dari anggota Tripika mengusulkan bahwa untuk menangani banjir yang ada di Wilayah Somba Opu, yakni dengan melakukan pengukuran di kanal induk di samping Citra Land, Sekarang sudah di upayakan dibuat saluran darurat karena kanal induk sudah penuh.
- b. Kebakaran yang Melanda kawasan Rumah toko di jalan syamsuddin tunru, Kelurahan Sunggu Minasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berhasil di padamkan, upaya yang dilakukan oleh anggota tripika adalah dengan menghubungi dinas Kebakaran dan penanggulangan bencana untuk di kerahkan melakukan pemadaman.

Hasil wawancara dengan pegawai kecamatan mengungkapkan :

*“...kalau di sini, kami bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Kami hanya berkoordinasi jika memang ada hal yang perlu di bahas atau ada informasi yang mesti dibagi...” ( hasil wawancara dengan Z, 13/11/2017 )*

Hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah kecamatan dan juga instansi lainnya hanya melakukan koordinasi jika ada hal atau informasi yang mesti dibagi ke sesama instansi. Kesatuan tindakan dalam hal koordinasi sangatlah dibutuhkan agar instansi-instansi yang bersangkutan tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, kesatuan tindakan ini juga akan membuat pekerjaan jadi lebih terarah dan juga akan mempererat rasa silaturahmi antar instansi maupun masyarakat sekitar yang terlibat. Sama halnya pemerintah kecamatan, pihak danramil melakukan tugasnya sebagai anggota TRIPIKA dan berkoordinasi jika ada hal yang mesti dibicarakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan anggota Danramil :

*“...jika ada kegiatan atau ada rapat TRIPIKA kami akan segera turun dan langsung melaksanakan apa saja yang menjadi tugas dan bagian kami....” (wawancara dengan SR tanggal 15/11/2018)*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan jika memang masing-masing instansi yang menjadi anggota TRIPIKA berjalan sendiri-sendiri dengan alasan bahwa mereka sudah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai anggota TRIPIKA di Kecamatan Somba Opu. Rapat atau pertemuan pun akan dilakukan jika memang ada hal penting yang harus dibicarakan atau ada informasi yang mestinya dibagi. Padahal dalam hal koordinasi sangat penting meskipun masing-masing telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetap harus menerapkan prinsip koordinasi yakni kesatuan tindakan

agar tujuan yang ingin dicapai dalam pemanfaatan pasar sub terminal agrobisnis ini dapat terwujud dengan baik.

Hasil wawancara dengan masyarakat :

*“...tiga pimpinan kecamatan di sini tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri, jika ada kegiatan yang di lakukan maka mereka anggota tripika akan turun ke lapangan dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing...” (hasilwawancara dengan H tanggal 18/12/2018)*

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat mengatakan jika anggota tripika di kecamatan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keamanan di wilayah kecamatan somba opu dengan baik. Hanya saja dalam suatu koordinasi sebaiknya para anggota tripika harus menggunakan prinsip kesatuan tindakan dalam bertindak. Meskipun masing-masing sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap harus berjalan satu komando.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut , menurut Hasibuan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam koordinasi yakni kesatuan tindakan dalam bekerja sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan koordinasi sesama anggota TRIPIKA di kecamatan Somba Opu karena dengan menerapkan kesatuan tindakan akan membuat instansi-instansi yang bersangkutan tidak berjalan sendiri-sendiri dan apabila ada masalah maka dapat diselesaikan dengan baik. Sangat penting kesatuan tindakan ini dimiliki agar pekerjaan dapat terorganisir dengan baik dan tidak ada pihak yang acuh tak acuh dalam bekerja karena masing-masing sadar akan tanggung jawab dan tugasnya.

b) Komunikasi



Suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Komunikasi secara sederhana dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan.

Sebelum memberikan komunikasi adanya Pertemuan/Rapat antara pimpinan dan anggota TRIPIKA, Komunikasi di sampaikan untuk merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi baik bisa disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Dengan adanya komunikasi maka kerjasama antar anggota TRIPIKA dapat berjalan lancar karena setiap instansi dapat memahami instansi yang lain dengan kemampuan komunikasi yang baik tentang informasi yang ada atau saat memberikan informasi dari masing-masing instansi yang bersangkutan. Selain itu manfaat dari komunikasi juga dapat menciptakan kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, pembentukan hubungan, serta pemanfaatan sumber daya. Karena itu, dengan adanya komunikasi ini maka diharapkan mampu membuat ketiga instansi yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik, manfaat

lainnya juga dapat membuat instansi yang ada mendapatkan informasi yang mungkin belum sempat didapat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah kecamatan :

*“...dalam hal koordinasi kami selalu menginformasikan apa-apa saja yang kami dapat atau hasil yang telah kami lakukan sebagai anggota TRIPIKA. Selain itu kami juga terkadang bertukar pendapat atau ide jika ada hal yang ingin kami lakukan sebagai anggota TRIPIKA ....” (hasil wawancara dengan ZU tanggal 13/11/2018)*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan jika pemerintah kecamatan memang melakukan komunikasi kepada pihak kapolsek, danramil, yang menjadi anggota TRIPIKA. Komunikasi memang sangatlah dibutuhkan dalam berkoordinasi karena tanpa komunikasi maka proses koordinasi itu tidak akan bisa diterapkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hasibuan yakni salah satu prinsip koordinasi yakni komunikasi antar instansi. Komunikasi pada dasarnya harus ada dalam hidup bersosialisasi dengan semua orang. Hal itu juga didukung dengan jawaban dari pihak kepolisian yakni :

*“...kami di sini selalu melakukan komunikasi dengan pihak danramil maupun pemerintah kecamatan. Meskipun kami memiliki masing-masing tugas, tapi kami selalu berkomunikasi apalagi jika ada kegiatan TRIPIKA yang akan kami lakukan..” (hasil wawancara dengan DW tanggal 20/11/2017)*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Kapolsek dan pemerintah kecamatan melakukan komunikasi dengan baik dalam hal berkoordinasi sesama anggota TRIPIKA. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pertukaran informasi dari masing-masing instansi jika ada informasi yang diketahui. Komunikasi antar instansi dalam berkoordinasi memang tak

bisa dipisahkan karena tanpa komunikasi maka pekerjaan tersebut akan sia-sia saja sebab tidak adanya masukan dan saran dari pihak luar. Sehingga penting untuk menjaga adanya komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua instansi tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip koordinasi menurut Hasibuan yakni komunikasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi telah dilakukan. Karena memang dalam koordinasi itu sangat diperlukan adanya komunikasi dengan pihak yang terkait, tanpa komunikasi dalam koordinasi maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Komunikasi merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, atau mengamati serta evaluasi pelaksanaan manajemen dalam mengelola pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga dalam hal apapun itu komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Semua program kerja dapat terselesaikan dengan adanya komunikasi, karena kita tahu bahwa komunikasi ini media untuk saling mengingatkan apalagi dalam hal kebaikan. Hubungan interpersonal akan menjadi dekat dan baik jika jalinan komunikasi ini berjalan dengan lancar. Disamping itu, komunikasi dan koordinasi adalah kunci luar biasa yang akan selalu terikat dimanapun dan kapanpun.

#### c) Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan pemisahan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam dalam suatu masyarakat tidak mungkin dikuasai dan dilakukan

oleh setiap orang. Oleh sebab itu, dibutuhkan spesialisasi, sehingga seseorang hanya mengerjakan satu atau beberapa jenis pekerjaan saja. Dasar bagi pembagian kerja yang paling mudah dilihat dan bersifat universal dalam masyarakat adalah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Manfaat pembagian kerja yaitu agar suatu pekerjaan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana dan dapat diketahui dengan jelas tujuan organisasi, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan tersebut. Di samping itu, pembagian kerja ini dilakukan agar masing-masing instansi yang terkait mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota TRIPIKA.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan :

*“...kami di sini biasanya melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat, juga berkoordinasi sesama anggota tripika mengenai penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota tripika di kecamatan somba opu ini. Di samping itu, kami juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum ...” (hasil wawancara dengan Z tanggal 27/11/2017)*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dari pemerintah kecamatan adalah membina serta berkoordinasi baik dalam hal penyelenggaraan maupun dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Diketahui jika kecamatan menjalankan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan kepadanya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sehingga kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang mencakup segala aspek yang ada di masyarakat kecamatan somba opu.

Hasil wawancara dengan anggota danramil :

*“...kami di sini bertugas dalam hal pengumpulan dan pemeliharaan data geografis, demografis, dan kondisi social dalam rangka menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh di kecamatan somba opu ini. Di samping itu juga kami juga melakukan pembinaan kemampuan dan mental masyarakat...” (hasil wawancara dengan SR tanggal 15/11/2017).*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan jika tugas danramil yakni menjaga daerah teritorialnya. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan pembinaan baik dari kemampuan dan mental masyarakat serta peningkatan kesejahteraan, moril, hukum, disiplin,dan tata tertib satuan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menciptakan keinginan rakyat untuk bersama-sama melaksanakan perlawanan rakyat dalam mempertahankan wilayahnya.

Hasil wawanacara juga dilakukan di kapolsek setempat :

*“...tugas kami di sini mengatur serta mengendalikan keamanan masyarakat setempat jika ada hal yang tak diinginkan terjadi. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, pengamanan wilayah kecamatan somba opu....” (hasil wawancara dengan L tanggal 20/12/2017).*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dari kapolsek adalah menjaga keamanan wilayah serta melaksanakan pelayanan keamanan di kecamatan somba opu. Kapolsek sebagai salah satu pimpinan di kecamatn memang sangatlah berpengaruh dalam hal pengamanan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan masyarakat :

*“...di sini anggota tripika memiliki masing-masing tugasnya, tidak ada yang saling mencampuri tetapi saling bekerja sama dan melengkapi. Bekerja sesuai tupoksinya. Kami sebagai masyarakat juga ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan tripika di kecamatan somba opu...” (hasil wawancara dengan F tanggal 18/12/2017).*

Hasil wawancra di atas dengan masyarakat di atas membenarkan jika memang anggota tripika ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal tersebut sangatlah penting agar masing-masing pihak tidak ada yang saling mengharapkan untuk bekerja di bagian yang bukan tugas mereka. Sehingga nantinya pekerjaan yang akan diselesaikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai keinginan.

Kesimpulan dari hasil wawancara ketiga instansi tersebut di atas yakni ketiga instansi tersebut telah menjalankan dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Menurut Hasibuan, beberapa prinsip koordinasi yang salah satunya adalah pembagian kerja memang sangatlah penting adanya. Dengan melakukan pembagian kerja, maka tugas yang akan dikerjakan menjadi lebih ringan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Pembagian kerja ini berguna agar setiap orang atau instansi mengetahui tugasnya dan mampu bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### d) Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan, danramil, serta kapolsek. *Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tak sepatutnya dilakukan.* Rivai (2005:44) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan pada manajer untuk berkomunikasi

dengan manajer agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan instansi yang terkait dalam mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma social yang berlaku. Sikap disiplin ini sangatlah penting sehingga tiap individu wajib memilikinya karena dengan sikap ini merupakan dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh dalam segala hal baik dalam urusan pribadi maupun kepentingan bersama. Hal itu juga harus diciptakan dalam diri individu di pemerintah kecamatan, danramil dan kapolsek karena bagaimanapun sikap disiplin ini merupakan bentuk tanggung jawab serta kepatuhan untuk menjalankan seluruh ketentuan maupun aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan maupun tugas yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan :

*“...di sini kami tidak memiliki jadwal rutin sebagai anggota Tripika, kami akan turun ke lapangan jika memang sudah ada hal atau kegiatan yang ingin dilaksanakan di kecamatan somba opu..” (hasil wawancara dengan Z tanggal 27/11/2017).*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah di kecamatan tidak memiliki jadwal khusus untuk melaksanakan kegiatan di kecamatan sebagai anggota muspika. Anggota dari kecamatan akan melakukan turun lapangan jika memang akan melakukan kegiatan lalu berkoordinasi dengan anggota muspika lainnya. Prinsip kedisiplinan di sini belum maksimal dilakukan oleh anggota dari kecamatan. Hal itu perlu diperhatikan melihat kedisiplinan di sini sangatlah penting dalam berorganisasi.

Hasil wawancara dengan danramil yakni :

*“...mengenai jadwal pertemuan sabagai anggota tripika, kami tidak punya jadwal khusus. Hal itu karena pertemuan yang kami adakan kadang mendadak sehingga tak memiliki jadwal tertentu...” (hasil wawancara dengan SR tanggal 29/11/2017).*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memang dari pihak danramil juga tak memiliki jadwal khusus untuk mengadakan rapat atau pertemuan khusus sesama anggota tripika. Sehingga dalam hal ini prinsip koordinasi menurut Hasibuan juga belum terlaksana dengan baik. Kedisiplinan dalam koordinasi sangatlah penting karena tanpa adanya kedisiplinan, maka suatu organisasi akan menjadi sembrono dalam bekerja. Disiplin di sini bermanfaat meningkatkan rasa tanggung jawab setiap anggota tripika nantinya.

Hasil wawancara dengan kapolsek setempat :

*“...kami setiap hari memantau keadaan kampong di sini, mengenai jadwal rapat, tidak ada yang pasti. Kadang kami rapat hanya rapat sekali seminggu kadang pula dua minggu sekali..”(hasil wawancara dengan L tanggal 06/12/2017).*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan jika pihak kepolisian pun membenarkan jika tak ada jadwal khusus dalam hal rapat sesama anggota tripika. Dari sini dapat dilihat jika ketiga instansi ini baik dari pihak kecamatan, danramil maupun kapolsek masih belum termasuk kategori disiplin menurut prinsip koordinasi Hasibuan. Hal tersebut dilihat dari tidak jelasnya jadwal pertemuan atau rapat anggota tripika. Dalam hal koordinasi, disiplin di sini semestinya lebih diperhatikan. Organisasi jika ingin berjalan dengan baik, anggotanya harus memiliki rasa disiplin terlebih dahulu. Dimana kedisiplinan ini mengacu pada bagaimana instansi yang terkait memiliki



jadwal atau manajemen waktu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga nantinya tugas dan tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

### **C. Kendala Dalam Koordinasi TRIPIKA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Selama proses penelitian dilakukan, terdapat beberapa faktor – faktor yang muncul dalam koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu kabupaten gowa. Faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni faktor pendukung, dan faktor penghambat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu, Maka di bawah ini akan dibagi menjadi 2 yakni:

#### 1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung. Dalam proses pelaksanaan koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu yakni :

##### a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam membantu anggota tripika kecamatan somba opu sangatlah membantu. kegiatan baksos, dan menjaga keamanan dalam pencerahan Qalbuh Jum'at, Sehingga anggota tripika tidak sulit dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan somba opu.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan :

*“...Setiap ada kegiatan, masyarakat pasti ikut andil dalam pelaksanaannya. Sehingga kami di sini sebagai salah satu anggota tripika*

*merasa terbantu dalam melakukan kegiatan kami di sini. (hasil wawancara dengan ZU tanggal 04/01/2018)*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat begitu membantu anggota tripika di kecamatan somba opu. Partisipasi masyarakat di sini sangatlah penting karena tanpa partisipasi tersebut, segala kegiatan pun keberadaan tripika tiada gunanya.

#### b. Rasa Saling Menghargai Antara Unsur Tripika

Faktor penghambat merupakan suatu hal atau kejadian yang dapat menjadi kendala proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung dalam proses pelaksanaan koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu kabupaten Gowa.

Hasil wawancara dengan kapolsek :

*“...dalam melakukan setiap kegiatan di kecamatan somba opu ini, segala kegiatan yang kami lakukan berjalan baik. Masyarakat pun selalu membantu jika ada hal yang belum sepenuhnya mampu kami lakukan...”(hasil wawanvara dengan DW tanggal 06/12/2017)*

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kecamatan somba opu memiliki rasa saling Menghargai, Hal itu sangat penting karena dalam suatu wilayah memang harus saling Menghargai antara anggota Tripika.

#### 2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu hal atau kejadian yang dapat menjadi kendala proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung dalam proses pelaksanaan koordinasi anggota Tripika di kecamatan somba opu. Adapun beberapa penghambatnya yakni :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan atau program dari pemerintah. Dalam koordinasi anggota tripika yang merupakan hal yang sangat berpengaruh. Dari hasil observasi yang dilakukan, sarana dan prasarana di kecamatan somba opu masih terbilang belum lengkap. Hal itulah yang menjadi penghambat dalam lancarna koordinasi antar sesama anggota tripika.

Hasil wawancara dengan Komandan Daerah Militer, (DANRAMIL) yakni :

*“...dalam melaksanakan kegiatan di kecamatan somba opu, kami masih kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana di sini menyebabkan terkadang terhambatnya kegiatan..” (hasil wawancara dengan SRJ tanggal 29/11/2017).*

Hasil wawancara dengan anggota danramil ini menyimpulkan jika memang segala kegiatan sarana dan prasarana sangatlah penting demi menunjang kelancaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anggota tripika di kecamatan somba opu.

Tabel Sarana Dan Prasarana

<i>No</i>	<i>Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah/unit</i>
1.	Komputer	4 Buah
2.	kursi panjang	2 Buah
3.	motor viar	2 Buah
4.	Wc	1 Buah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah memahami BAB I pendahuluan, BAB II pembahasan, BAB III metode penelitian, dan BAB IV hasil dan pembahasan, maka tahap terakhir adalah BAB V penutup. Pada tahap ini akan dibahas tentang kesimpulan mengenai apa yang menjadi hasil penelitian dan saran yang akan diberikan penulis untuk para subjek dan objek kegiatan.

#### **A. Kesimpulan**

Koordinasi anggota Tripika di kecamatan somba opu ini masih belum berjalan maksimal. Dari hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditemui, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa koordinasi anggota tripika belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip koordinasi menurut Hasibuan yang belum semuanya terlaksana sebagaimana mestinya. Meskipun pemerintah kecamatan, danramil dan kapolsek telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, masih ada yang harus lebih dimaksimalkan. Dari hasil penelitian tentang koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu sejauh ini belum berjalan dengan baik ditinjau dari prinsip-prinsip koordinasi menurut Hasibuan yakni kesatuan tindakan, komunikasi, kedisiplinan, dan pembagian kerja masih ada indikator koordinasi yang belum terlaksana

dengan baik. Seperti pada indikator kedisiplinan dan kesatuan tindakan yang masih kurang maksimal sehingga harus lebih ditingkatkan lagi.

2. Faktor-faktor yang mendukung koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu yakni adanya partisipasi masyarakat yang begitu berperan penting dalam segala kegiatan tripika serta rasa hormat menghormati antara anggota tripika dan masyarakat setempat sehingga semuanya dapat hidup rukun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada koordinasi anggota tripika di kecamatan somba opu, ada hal-hal yang perlu dibenahi maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggota tripika yang terdiri dari kecamatan, danramil, serta kapolsek harus melakukan koordinasi yang lebih baik ke depannya agar tujuan yang ingin dicapai bersama lebih efektif dan efisien.
2. Partisipasi masyarakat harus diberi apresiasi dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota tripika di kecamatan somba opu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Burhan, Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Mirriam. 2009. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bayu Suryaningrat 1980 *Desa dan kelurahan penyelenggaraan pemerintahan*. Jakarta: Metro pos
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, Cetakan Kelima belas. Yogyakarta. Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handayaningrat 2002 *The principle and practice of managent*
- Kansil, 2002. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Bumi Aksara
- Kansil, 2001. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mariam Budiardjo 2012 *Dasar-dasar ilmu politik*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta.
- Patton. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Taliziduhu, Ndraha.2011. *Kybernology 1 Ilmu Pemerinah Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Penyusun Fisip Unismuh Makassar. 2015. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar

WidyaWicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta. GrahaIlmu

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Negara yang dinamakan Sistem Pertahanan Semesta*

Undang-undangnomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<http://gurupkn.com/anggota-muspika> di askestanggal 7 Februari 2017

<http://kec-pleret.bantulkab.go.id/muspika-instansi-lain> di askestanggal 7 Februari 2017

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=peran+muspika> di askestanggal 20 Februari 2017

<https://brainly.co.id/tugas/2529876> Di askestanggal 21 Februari 2017

<http://kompasiana.com.amp/nur-maya/fungsikoordinasi> di askestanggal 21 february 2017

<http://syarifhidayat21.blogspot.co.id/2010/11/koordinasi> di askestanggal 25 Februari 2017

<http://annisazuhrotuljannah.wordpress.com> di askestanggal 25 february 2017



*Sumber Data Dari Kantor Polsek Somba Opu Kab. Gowa*





**Sumber Data Dari Kantor Koramil Kec. Somba Opu Kab. Gowa**



**Sumber Data Diambil Dari Kantor Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa**

## RIWAYAT HIDUP



**ASBULLAH**, Lahir di SORONG pada tanggal 27 Februari 1988. Anak ke 3 dari 4 bersaudara. Ayah Muh Natsir Rewa dan Ibu Maimunah S.pd. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 26 LK Tupabbiring pada tahun 1994 lalu kemudian tamat pada tahun 2000.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bontomarannu Kab.Gowa lalu kemudian tamat pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Suadaya Palu dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2011 penulis mendaftar di universitas muhammadiyah makassar dan di terima di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dan selesai pada tahun 2018.